

**DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

Skripsi

Oleh

GIOVANNI ALBERTINE HUTAURUK

NPM 1846071008



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

**DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

**Oleh
GIOVANNI ALBERTINE HUTAURUK**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA SOSIAL

**Pada
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh

GIOVANNI ALBERTINE HUTAURUK

Memasuki abad ke-21, Korea Selatan berkomitmen untuk meningkatkan intensivitas dan efisiensi diplomasi publik dalam aktivitas luar negerinya. Namun, kemunculan pandemi COVID-19 telah memberikan beragam dampak terhadap berbagai aspek kehidupan dan kenegaraan, sehingga pandemi menjadi sebuah variabel yang perlu diperhatikan dalam konteks diplomasi publik Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan diplomasi publik Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19, pada rentang waktu tahun 2020 sampai 2023, dengan menggunakan konsep diplomasi publik.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi dokumen dan bahan visual. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan resmi kementerian, pidato resmi kenegaraan, dan catatan rekaman resmi yang diperoleh melalui situs web resmi milik lembaga-lembaga pemerintahan Korea Selatan. Data-data pendukung juga diperoleh dari hasil penelusuran pada media berita dan artikel jurnal.

Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Korea Selatan mempromosikan visi diplomasi publiknya untuk memperkuat posisi Korea Selatan di kancah internasional sebagai negara pemimpin dalam bidang kesehatan publik, transformasi digital, dan manajemen krisis. Dalam menjalankan diplomasi publik pada masa pandemi COVID-19, Korea Selatan menggunakan berbagai instrumen, khususnya – namun tidak terbatas pada – media sosial dan internet.

Kata kunci: diplomasi publik, Korea Selatan, pandemi, COVID-19.

ABSTRACT

SOUTH KOREA PUBLIC DIPLOMACY DURING THE COVID-19 PANDEMIC

By

GIOVANNI ALBERTINE HUTAURUK

Since the early 21st century, South Korea is committed to increasing the intensity and efficiency of public diplomacy in its foreign activities. However, the emergence of the COVID-19 pandemic has had various impacts on various aspects of life and the state, so that the pandemic has become a variable that needs to be considered in the context of South Korean public diplomacy. This research aims to describe South Korea's public diplomacy during the COVID-19 pandemic, in the period 2020 to 2023, using the concept of public diplomacy.

This research was conducted using a qualitative approach. The data used are secondary data obtained through literature review and textual and visual documents analysis. The data used in this research obtained from official ministry reports, official state speeches, and official records which are accessed through official websites of the South Korean government. Supporting data was also obtained from search results in news media and journal articles.

In this research, the author found that during the COVID-19 pandemic, the South Korean government promoted its public diplomacy vision to strengthen South Korea's position on the international stage as a leading country in the fields of public health, digital transformation and crisis management. In carrying out public diplomacy during the COVID-19 pandemic, South Korea used various instruments, especially – but not limited to – social media and internet.

Key words: public diplomacy, South Korea, pandemic, COVID-19.

Judul Skripsi

**DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Nama Mahasiswa

Giovanni Albertine Hutauruk

Nomor Pokok Mahasiswa

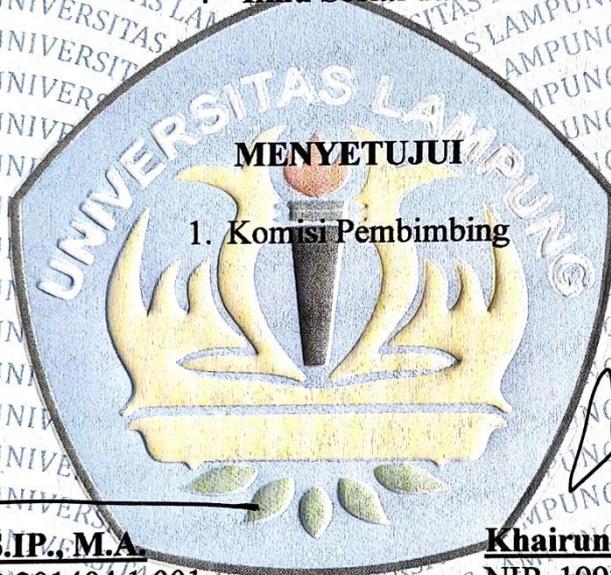
1846071008

Jurusan

Hubungan Internasional

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

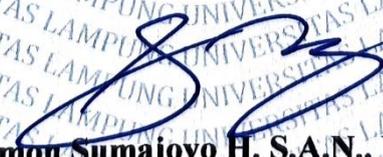

Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

NIP. 19791230 201404 1 001


Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.

NIP. 19920926 202321 2 049

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.P.A.

NIP. 1981062820050111003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

Sekretaris : Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.

Penguji Utama : Gita Karisma, S.IP., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Juli 2024





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon / Fax. (0721) 704626 Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id>

Form A.6f

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 4 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Giovanni Albertine Hutaaruk
NPM 1846071008

Catatan

Pernyataan ini diletakkan pada halaman setelah abstrak.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 24 Juni 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Albert Mangapul Hutauruk dan Ibu Rina Nugraheni. Penulis memiliki dua adik laki-laki dengan nama Farel dan Dewa. Penulis telah menempuh pendidikan formal sejak Taman Kanak-Kanak (TK) Hang Tuah II yang diselesaikan pada tahun 2006. Kemudian, Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Xaverius Kotabumi dan telah diselesaikan pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada yayasan yang sama, yaitu di SMP Xaverius Kotabumi yang telah diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Kotabumi yang telah diselesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Jurusan Hubungan Internasional. Selama masa perkuliahan, penulis aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Social Political English Club (SPEC) dan dipercaya menjadi General Leader (Ketua Umum) pada tahun 2019. Penulis juga berperan aktif sebagai pengurus pada Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJHI) dan sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum pada tahun 2019. Selanjutnya, dalam pengimplementasian kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis melaksanakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021. Kemudian, penulis juga telah melaksanakan pengembangan diri di luar lingkungan kampus melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan program percepatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) FISIP di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbagnpol) Provinsi Lampung selama delapan bulan pada tahun 2021.

MOTTO

本当に本気で何かを成し遂げるとき人はいつだって孤独です

(Hontōni honki de nanika o nashitogeru toki hito wa itsu datte kodokudesu)

“Orang selalu kesepian ketika mereka benar-benar berusaha mencapai sesuatu.”

一人じゃなければダメなんですよ 慣れ あったら終わりなんです.

(Hitori janakereba damena ndesu yo, nare attara owarina ndesu.)

“Kalau bersikap manja, maka tamatlah.”

– Elaina (Majo No Tabitabi) –

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan segenap kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk:

Papa dan Bunda. Terima kasih banyak atas didikan, bimbingan, kesabaran, kasih sayang, dan doa yang telah diberikan selama ini,

Keluarga Berencana dan Jamie yang senantiasa menyemangati dan menemani dalam setiap prosesnya,

Serta

Almamater Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Diplomasi Publik Korea Selatan Pada Masa Pandemi COVID-19**”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Roby Cahyadi, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
7. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama, Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, dan Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Penguji,

yang telah memberikan ilmu, nasihat, bimbingan, serta selalu meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penulis melalui proses penyelesaian skripsi.

8. Mas Moh. Nizar, S.IP., M.A. dan Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing penulis dengan kesabaran, memberikan banyak masukan, saran dan arahan selama menjalani perkuliahan di Hubungan Internasional Universitas Lampung hingga mendapatkan judul dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh jajaran Dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung beserta Staff Jurusan yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Papa Albert dan Bunda Rina yang selalu mendukung dan selalu mendoakan penulis di setiap langkah, mendidik, merawat, dan memberikan kasih sayang yang tak lekang waktu.
11. Adik-adik, Farel dan Dewa, yang telah mendukung penulis dan menjadi penyemangat bagi penulis.
12. Keluarga Berencana, Anggi, Bintang, Leonny, Leo, dan Hanif, yang telah menjadi sahabat terbaik dalam melewati halangan dan rintangan kehidupan ini, selalu ada dalam suka dan duka. Meski tidak selalu satu pikiran dan pendapat, tetapi tetap bergandengan. Semoga ikatan persahabatan kita tidak putus oleh waktu.
13. Vincenzo Eugene Jamie Samodro, partner dalam segala hal yang senantiasa hadir menemani penulis dalam setiap proses jatuh-bangun dalam menyelesaikan skripsi, memberikan semangat dan masukan, serta menyayangi penulis dengan setulus hati.
14. Grup Ngurus KOMPRES HI Unila (Agam, Pyngkan, Fuji, Bunga, Sabil, dan Eta) yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam mengurus administrasi menuju ujian komprehensif.

15. Teman-teman KKN Subik (Al, Manda, Erisha), segenap mahasiswa HI 2018, serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas dukungan, doa, bantuan, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis, semoga kalian juga menerima segala kebaikan dunia ini sebagaimana kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.

Bandar Lampung, Agustus 2024

Penulis,

Giovanni Albertine Hutauruk

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Konseptual	15
2.2.1 Diplomasi Publik	15
2.2.2 Pandemi COVID-19.....	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
III. METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28

3.5 Teknik Analisis Data	28
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Kondisi Korea Selatan Pada Masa Pandemi COVID-19	30
4.2 Diplomasi Publik Korea Selatan Pada Masa Pandemi COVID-19.....	33
4.2.1 <i>Listening</i>	35
4.2.2 <i>Advocacy</i>	36
4.2.3 <i>Cultural Diplomacy</i>	37
4.2.4 <i>Exchange Diplomacy</i>	38
4.2.5 <i>International Broadcasting</i>	39
V. SIMPULAN DAN SARAN	42
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Pemikiran.....	25
4. 2 Poster Konser Virtual Korea Selatan pada Juni 2020	37
4. 3 Tampilan utama situs web King Sejong Institute (KSI)	38
4. 4 Poster Konferensi Online “Effective Public Communication for an Inclusive Response and Recovery from COVID-19.”	39
4. 5 Tampilan Depan Saluran KOREAZ di Youtube.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	13

DAFTAR SINGKATAN

AR	: <i>Augmented Reality</i>
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>
K-POP	: <i>Korean Popular Music</i>
K-DRAMA	: <i>Korean Drama</i>
K-MOVIE	: <i>Korean Movie</i>
KCC	: <i>Korean Cultural Center</i>
KCDC	: <i>Korea Centers for Disease Control and Prevention</i>
KFS	: <i>Korea Forest Service</i>
KSI	: <i>King Sejong Institute</i>
MCST	: <i>Ministry of Culture, Sport, and Tourism</i>
MERS	: <i>Middle East Respiratory Syndrome</i>
MOFA	: <i>Ministry of Foreign Affairs</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
ROK	: <i>Republic of Korea</i>
SARS	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
SIM	: <i>Strategic Issue Management</i>
TIK	: <i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNICEF	: <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>

VR : *Virtual Reality*
WHO : *World Health Organization*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Diplomasi publik adalah cara berkomunikasi dengan masyarakat luar negeri. Diplomasi publik berupaya membangun hubungan dengan negara lain dengan cara memahami kebutuhan, kebudayaan, dan masyarakatnya agar dapat membangun keyakinan atau pemahaman bersama (Leonard, 2002). Dengan diplomasi publik, suatu negara dapat: meningkatkan keakraban dengan negara lain (membuat orang berpikir tentang negara dan memperbarui gambaran mereka tentang negara tersebut); meningkatkan apresiasi (menciptakan persepsi positif terhadap negara dan membuat orang lain melihat permasalahan dari sudut pandang); menarik masyarakat (mendorong masyarakat untuk melihat negara sebagai tujuan wisata dan studi yang menarik serta mendorong mereka untuk membeli produk-produknya dan menganut nilai-nilainya); dan mempengaruhi perilaku masyarakat (mendorong perusahaan untuk berinvestasi, mendorong dukungan publik terhadap posisi negara Anda, dan meyakinkan politisi untuk menjadikan negara tersebut sebagai sekutu) (Leonard et al., 2002).

Diplomasi publik ada untuk beberapa tujuan, seperti meningkatkan kinerja ekonomi, membangun identitas nasional, menangani isu-isu jangka pendek, mendukung tujuan jangka panjang dalam kebijakan luar negeri, memperbaiki citra suatu negara, dan bahkan menghilangkan gambaran khas yang berkaitan dengan masa lalu mereka (Gonesh & Melissen, 2005). Salah satu contoh negara yang melakukan diplomasi publik untuk mendukung pemulihan ekonomi serta

memperbaiki citra masa lalunya adalah Korea Selatan. Pada periode 1940an hingga 1980an, Korea Selatan menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali identitas nasionalnya yang hancur akibat penjajahan Jepang selama 35 tahun. Pemerintah Korea Selatan mengimplementasikan diplomasi publik untuk memperbaiki budaya dan memperkuat identitas nasional (Abduazimov, 2017; Mi Sook Park, 2016; Yim, 2002). Pada awal kemerdekaannya di akhir 1940an, fokus utama adalah menghapus pengaruh budaya Jepang dan mengembalikan warisan budaya Korea yang asli. Program-program ini mencakup revitalisasi bahasa Korea, pelestarian dan pengembangan seni tradisional seperti musik, tari, dan kerajinan tangan, serta penguatan pendidikan yang menekankan sejarah dan budaya Korea (Yim, 2002). Pemerintah Korea Selatan membentuk Undang-Undang Perlindungan Warisan Budaya yang memberikan kerangka hukum untuk pelestarian warisan budaya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (*Korea Heritage Service*, n.d.). Pada tahun 1973, pemerintah Korea Selatan menerbitkan "rencana induk lima tahun pertama untuk pembangunan budaya" untuk periode 1974–1979 (Yim, 2002). Rencana ini merupakan rencana jangka panjang komprehensif pertama untuk kebijakan budaya. Meskipun dianggap sebagai tujuan utama kebijakan budaya, tujuan prioritas utama dari rencana ini adalah untuk membangun identitas budaya baru dengan menonjolkan tradisi budaya Korea Selatan (Yim, 2002).

Selama periode 1940an hingga 1980an, Korea Selatan mempromosikan budaya mereka ke dunia internasional sebagai bagian dari strategi diplomasi publik. Pemerintah Korea Selatan menerbitkan dan menyebarkan majalah yang fokus pada budaya Korea, mengadakan pameran budaya, dan menjalankan program pertukaran pelajar dan olahraga (Choi, 2019). Pemerintah menggunakan media massa untuk menyebarkan nilai-nilai dan budaya Korea, serta memperbaiki citra negara di mata dunia. Majalah seperti *Korea Today*, *Korean Arts*, dan *Korean Survey* menjadi alat utama mereka (Choi, 2019). Pemerintah juga membeli media seperti surat kabar berbahasa Inggris *Korea Times* dan majalah bulanan *Pictorial Korea*, lalu menyebarkannya ke lembaga dan orang-orang asing melalui kedutaan besar mereka (Choi, 2019). Selain itu, mereka menyumbangkan kostum pernikahan tradisional Korea ke Smithsonian Museum dan mengirim foto, musik, film, buku, kerajinan tangan, dan pakaian tradisional ke kedutaan besar Korea di luar negeri (Choi, 2019).

Pada tahun 1947, Korea Selatan mulai meningkatkan aktivitas pertukaran, di mulai dari mengirim tiga mahasiswa pertama ke Amerika Serikat (Choi, 2019). Pada tahun 1956, pemerintah Korea Selatan mengirim 22 delegasi olahraga ke luar negeri, lalu empat atlet ke Kejuaraan Skating Internasional pada Desember 1948, dan 136 seniman ke Asia Tenggara sebagai duta seni pada Februari 1958 (Choi, 2019). Pada Oktober 1968, pemerintah Korea Selatan menjadi tuan rumah *Social Culture Center of the Asian and Pacific Council* di Seoul (Choi, 2019). Pada tahun 1970-an, kebijakan luar negeri Korea Selatan diarahkan untuk memperluas hubungan bilateral dan multilateral (Choi, 2019). Hal ini ditujukan untuk dapat mengembangkan perekonomian Korea Selatan. Diplomasi publik Korea Selatan meluas hingga mencakup pertukaran budaya dan diplomasi olahraga, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara partner/aliani serta meningkatkan keamanan dan kesejahteraan nasional (Choi, 2019). Hal ini terbukti dengan penyelenggaraan Asian Games 1986 dan Olimpiade Seoul 1988, yang dipandang sebagai peluang untuk memamerkan kemajuan negara dan menumbuhkan niat baik internasional (Choi, 2019).

Pada periode 1990an, seiring dengan berakhirnya Perang Dingin dan Korea Selatan yang mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB, diplomasi publik Korea Selatan difokuskan untuk menunjukkan keikutsertaan aktif dalam komunitas dunia, pencitraan sebagai negara yang berhasil dalam perkembangan sosio-ekonomi, dan demokratisasi sistem politik (Abduazimov, 2017). Haluan ini berupaya diwujudkan melalui pembentukan Korea International Cultural Association (KOICA) dan Korea Foundation (KF) yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Korea (Abduazimov, 2017). KF dibentuk untuk memajukan tujuan-tujuan diplomasi publik tersebut, dengan fokus pada peningkatan kesadaran tentang Korea dan mempromosikan kerja sama internasional (Choi, 2019). Misi dari KF adalah untuk 1) mendukung studi Korea di luar negeri; (2) pertukaran budaya dan seni; (3) membangun jaringan global; dan (4) memberikan dukungan terhadap media (Abduazimov, 2017). Adapun program yang dijalankan melalui KF sebagai contoh, pemberian dukungan hibah bagi mahasiswa pascasarjana yang hendak mengambil jurusan Studi Korea di universitas terkemuka di luar negeri (Abduazimov, 2017). KF juga mendukung penyiaran program drama TV Korea di luar negeri yang

ditandai dengan penandatanganan perjanjian dengan delapan negara di kawasan Amerika Tengah dan Selatan pada tahun 2015 (Abduazimov, 2017). Perjanjian ini mengusulkan penayangan tiga program drama TV Korea yang diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Baik KOICA dan KF telah menjadi promotor utama bagi diplomasi publik Korea Selatan secara global (Abduazimov, 2017).

Diplomasi publik Korea Selatan pada periode 1991 sampai 2012 ditandai dengan munculnya fenomena Hallyu atau Korean Wave (Abduazimov, 2017). Fenomena ini dicirikan dengan meluasnya produk-produk kebudayaan Korea Selatan secara global, mulai dari penyebaran melalui media massa tradisional, hingga peningkatan pesat akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Abduazimov, 2017). Pada periode ini, pemerintah Korea Selatan fokus pada industrialisasi budaya. Proses ini melibatkan kolaborasi antara publik dan swasta (Abduazimov, 2017). Hasilnya, Korean Wave menjadi jalan masuk bagi para chaebol di Korea Selatan ke pasar internasional, dengan memperkenalkan produk-produk Korea (Abduazimov, 2017). Fenomena Korean Wave tidak hanya dipandang sebagai penguatan terhadap kebudayaan asli Korea Selatan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan (Abduazimov, 2017). Korean Wave telah berkontribusi terhadap diplomasi publik Korea Selatan, khususnya dalam membangun pemahaman dan hubungan lintas budaya antara Korea dan masyarakat asing (Abduazimov, 2017). Dengan keberhasilan Korean Wave dalam meningkatkan popularitas Korea di luar negeri, pemerintah Korea memanfaatkan fenomena ini sebagai alat kebijakan (Gunjoo Jang & Won K. Paik, 2012), menyalurkannya untuk meningkatkan diplomasi publiknya dengan meletakkan dasar bagi kemitraan antara publik dan swasta. Dengan demikian, lingkaran aktor diplomasi publik Korea Selatan telah diperluas, dari aktivitas yang semata-mata dipimpin oleh negara, menjadi kerangka kerja polisentris antara publik dan swasta (Abduazimov, 2017).

Pada periode 2012 sampai 2020, diplomasi publik Korea Selatan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan citra Korea di kancah internasional, tetapi juga memperkuat *soft-power*-nya. Dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan mengintegrasikan diplomasi publik ke dalam kebijakan luar negerinya (Abduazimov, 2017). Proses ini didorong, salah satunya, oleh adanya dua kekuatan

besar yang mengelilingi Korea, seperti Tiongkok dan Jepang, sehingga Pemerintah Korea Selatan mempertahankan status quo dalam hal *hard power* (Abduazimov, 2017). Sebagai alternatif, *soft-power* ditingkatkan untuk memperkuat pengaruh Korea Selatan di tingkat internasional. Institusionalisasi terhadap diplomasi publik Korea Selatan dilakukan, seperti pembentukan *Presidential Council on Nation Branding* (PCNB), penyesuaian terhadap divisi diplomasi publik dalam Kementerian Luar Negeri Republik Korea, serta peresmian *Public Diplomacy Act* sebagai kerangka yang mengatur pelaksanaan diplomasi publik di Korea Selatan (Choi, 2019). Dalam pelaksanaannya, pemerintah Korea Selatan menggunakan berbagai instrumen, seperti pengetahuan, pertukaran, budaya, dan teknologi digital (*Introduction of the Public Diplomacy & Policies*, n.d.).

Memasuki tahun 2020, terdapat penyesuaian terhadap diplomasi publik Korea Selatan. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pada Maret 2020, WHO menyatakan pandemi global untuk COVID-19 setelah penyebarannya di lebih dari 21 negara. Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, dan menyerupai SARS dan MERS, namun menyebar lebih cepat dan berpotensi menyebabkan penyakit parah, terutama pada orang lanjut usia atau dengan kondisi kesehatan tertentu (World Health Organization, 2023). Selama pandemi COVID-19, Korea Selatan menerima dampak di berbagai aspek. Secara ekonomi, Korea Selatan mengalami penurunan PDB sebesar 1,3% dan 3,2% pada kuartal pertama dan kedua tahun 2020 (Gurung, 2021). Pada tahun ini, Korea mengalami penurunan ekspor sebesar 24,3%. Penurunan ini termasuk penurunan ekspor barang sebesar 11,5% dan jasa sebesar 22,1% pada kuartal kedua (Stangarone, 2021). Penurunan pada ekspor jasa paling banyak dipengaruhi oleh menurunnya sektor perjalanan, pariwisata, dan transportasi (Stangarone, 2021). Pada tahun 2019, Korea Selatan menerima keuntungan sebesar \$21,5 juta dari sektor pariwisata. Jumlah ini telah meningkat dari tahun sebelumnya yaitu \$18,46 juta (Gurung, 2021). Meski demikian, pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, jumlah wisatawan Korea Selatan menurun sebanyak 84% dan pendapatan Korea Selatan dari sektor pariwisata mengalami penurunan sebesar 68,5% (Stangarone, 2021). Terjadinya penurunan pada industri ini didorong oleh adanya pembatasan perjalanan sejak

terjadinya pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan penurunan yang signifikan pada jumlah turis asing yang masuk ke negara Korea Selatan (Stangarone, 2021).

Dalam menangani dampak pandemi COVID-19, pemerintah Korea Selatan menerapkan berbagai upaya, salah satunya adalah melalui penerapan strategi diplomasi publik. Pada masa ini, pemerintah Korea Selatan berkomitmen untuk memfokuskan diplomasi publiknya pada upaya pemulihan dari pandemi COVID-19. Komitmen ini tercantum dalam kebijakan diplomasi publik yang secara resmi diumumkan pada saluran Kementerian Luar Negeri Republik Korea. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa sebagai tanggapan terhadap mewabahnya COVID-19, Kementerian Luar Negeri Republik Korea akan menggunakan diplomasi publik untuk memperkuat citra Korea Selatan sebagai model dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk merespons pandemi COVID-19 (*Post COVID-19 Public Diplomacy Policy*, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Diplomasi publik dijalankan oleh Korea Selatan dan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Memasuki abad ke-21, Korea Selatan berkomitmen untuk meningkatkan intensivitas dan efisiensi diplomasi publik dalam aktivitas luar negerinya. Namun, kemunculan pandemi COVID-19 telah memberikan beragam dampak terhadap berbagai aspek kehidupan dan kenegaraan, sehingga pandemi menjadi sebuah variabel yang perlu diperhatikan dalam konteks diplomasi publik Korea Selatan. Berangkat dari pemahaman tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian, **“Bagaimana diplomasi publik Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kondisi Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19.
2. Mendeskripsikan diplomasi publik Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 – 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum terdapat dua jenis manfaat penelitian, yaitu manfaat teoretis atau akademis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis merupakan bentuk manfaat penelitian yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian dapat dikatakan memiliki manfaat teoretis apabila dikemudian hari penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi pengembangan teori atau penelitian lanjutan suatu kajian ilmiah. Sedangkan, manfaat praktis merupakan bentuk manfaat di mana penelitian dapat menjelaskan dan/atau memecahkan suatu masalah praktis. Suatu penelitian juga dapat dikatakan memiliki manfaat praktis apabila penelitian tersebut memiliki saran atau rekomendasi praktis dari suatu kebijakan.

Suatu penelitian dapat memiliki manfaat teoretis dan/atau manfaat praktis. Penelitian berikut ini memiliki manfaat teoretis, yakni dengan membuktikan relevansi teori dan konsep yang digunakan dengan studi kasus pada penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki topik serupa, sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dalam penelitian berikutnya. Adapun hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan suatu ide/gagasan keilmuan terkait hubungan internasional, kebijakan luar negeri, diplomasi publik, kemajuan teknologi, dan perekonomian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini. Studi literatur dapat membantu penulis dalam membangun kerangka pemikiran dan menemukan landasan teori yang tepat untuk memandu penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa di antara penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut.

Artikel penelitian Mi Sook Park (2016) memberikan analisis terperinci tentang kebijakan budaya Korea Selatan dari tahun 1970-an hingga saat ini. Artikel tersebut menyoroti pentingnya memahami kebijakan budaya Korea Selatan dalam konteks pembangunan negara. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan cara-cara negara telah memanfaatkan kebijakan budayanya untuk mencapai tujuan nasional melalui praktik kelembagaan dan proyek-proyek sentral. Penelitian ini berfokus pada peran negara dalam pengembangan budaya, khususnya pada cara pemerintah melalui kebijakan budayanya dapat merekonstruksi budaya dan ekonomi nasional Korea sejak rezim militer pertama Park Chunghee hingga setelah Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997.

Penelitian ini mengategorikan kebijakan budaya menjadi beberapa periode berdasarkan tujuannya, yaitu: 1) Pembangunan identitas nasional pada masa pemerintahan Rhee Syngman (1948-1960). Pada periode ini, yang menjadi tantangan utama pemerintah Korea Selatan adalah mengatasi pengaruh Jepang selama 35 tahun, dan kehancuran akibat perang selama tiga tahun. Pada masa ini,

negara berperan penting dalam membentuk gerakan budaya nasional dan untuk mempromosikan olahraga nasional Taekwondo ke kancah internasional; 2) Budaya sebagai instrumen rezim otoriter. Periode ini berlangsung dari masa pemerintahan Park Chunghee hingga Roh Taewoo (1963-1993). Negara menggunakan kebijakan budaya untuk memperkuat otoritarianisme dan mempromosikan kebanggaan nasional. Pemerintah Park Chunghee mendirikan Kementerian Informasi Publik, yang mengawasi film, teater, dan seni pertunjukan lainnya. Kementerian Informasi Publik mulai mensistematisasi dan memusatkan semua kebijakan dan badan legislatif yang terkait dengan budaya untuk menumbuhkan identitas nasional Korea Selatan dan mengonsolidasikan kekuatan rezim otoriter; terakhir, 3) Budaya sebagai instrumen ekonomi nasional. Masa ini dimulai dengan pemerintahan Kim Youngsam dari tahun 1993. Tujuannya adalah untuk membuat negara lebih berorientasi internasional dan mengangkat status Korea Selatan secara global. Pemerintah Kim menganggap budaya dan seni negara sebagai bagian dari kekayaan nasional, yang menegaskan dampak ekonomi budaya. Pemerintah Kim Daejung menata ulang ekonomi negara dengan strategi neoliberal dan bentuk-bentuk pembuatan kebijakan korporatis.

Penelitian Mi Sook Park juga memberikan analisis terperinci mengenai berbagai undang-undang dan kebijakan yang disahkan antara tahun 1963 dan 2013, yang dikategorikan menurut seni, olahraga dan pariwisata, warisan, dan industri budaya. Data tersebut menyoroti jumlah undang-undang dan kebijakan yang disahkan selama masa jabatan masing-masing pemerintah, yang memberikan wawasan mengenai perspektif pemerintah terhadap kebijakan budaya. Misalnya, antara tahun 1988 dan 2013, total 294 undang-undang dan 1.169 kebijakan budaya disahkan, dengan peningkatan signifikan dalam kebijakan terkait industri budaya selama pemerintahan Kim Youngsam dan Lee Myoung-bak.

Penelitian terdahulu yang kedua oleh Seow Ting Lee dan Hun Shik Kim (2021) memberikan analisis mendalam tentang respons Korea Selatan terhadap pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap citra global negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang diteliti melalui triangulasi sumber dan metode.

Para penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber bukti, termasuk liputan media berita, komunikasi pemerintah, dan analisis sentimen dari postingan media sosial dan laporan berita internasional. Mereka menggunakan Leximancer, sebuah perangkat lunak penambang teks, untuk melakukan analisis sentimen dan mengekstrak subjektivitas dalam teks untuk mengukur sikap pembicara atau penulis terhadap suatu konsep. Analisis sentimen menunjukkan representasi yang luar biasa dari sentimen positif tentang upaya penanganan COVID-19 oleh Korea Selatan, dengan 96% teks menunjukkan penyebutan positif.

Penelitian ini menyoroti kolaborasi sektor publik-swasta yang kuat di Korea Selatan selama pandemi, yang telah mengarah pada pengembangan dan ekspor alat tes COVID-19 yang cepat. Prioritas pemerintah terhadap kesehatan masyarakat yang luar biasa, bahkan di tengah kemerosotan ekonomi, telah berperan penting dalam keberhasilan politik negara tersebut selama pandemi. Penelitian ini juga membahas potensi kontroversi seputar ketergantungan Korea Selatan pada pelacakan kontak digital dan catatan pribadi, tetapi mencatat bahwa sebagian besar orang Korea Selatan memprioritaskan hasil kesehatan masyarakat di atas masalah privasi.

Artikel penelitian ini berkontribusi pada literatur tentang diplomasi publik dan nation branding dengan menjadi studi pertama yang membahas perpaduan kedua konsep ini. Artikel penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana respons Korea Selatan terhadap pandemi COVID-19 telah meningkatkan citra globalnya dan menjadikannya sebagai pemimpin dan model kesehatan global dalam mengatasi pandemi. Secara keseluruhan, artikel ini menawarkan tinjauan yang terperinci dan komprehensif tentang diplomasi publik pandemi Korea Selatan, memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sebuah negara dapat secara efektif mengelola krisis kesehatan masyarakat dan mempertahankan nation brand yang positif.

Artikel penelitian terdahulu yang berikutnya ditulis oleh Muzaffar S. Abduazimov (2017), yang memberikan analisis komprehensif tentang evolusi diplomasi publik Korea Selatan dari pendekatan pemerintah-ke-publik (G2P) menjadi model publik-ke-publik (P2P). Artikel penelitian ini menyoroti peran penting aktor non-negara, khususnya dalam fenomena Hallyu, dalam transformasi

diplomasi publik Korea Selatan. Artikel penelitian ini dimulai dengan membahas pergeseran dari diplomasi publik G2P ke P2P, yang didorong oleh perkembangan teknologi komunikasi dan globalisasi. Artikel penelitian ini menekankan pentingnya pemerintah nasional sebagai perencana diplomasi publik, meskipun bekerja sama dengan aktor non-negara dalam pendekatannya. Penelitian ini kemudian menggali asal-usul diplomasi publik Korea Selatan, yang muncul antara tahun 1948 dan akhir 1980-an. Periode ini merupakan masa dimana pemerintah Korea Selatan melibatkan publik lokal dan asing melalui diplomasi budaya dan olahraga, yang didorong oleh perkembangan sosial ekonomi dan faktor geopolitik. Artikel penelitian ini menyebut periode ini sebagai periode "diversifikasi" karena periode ini menandai perubahan dalam keterlibatan pemerintah dengan publik asing.

Artikel penelitian ini kemudian membahas transformasi struktural diplomasi publik Korea Selatan pada tahun 1990-an, yang didorong oleh demokratisasi dan liberalisasi sistem politik-ekonomi Korea dan krisis keuangan asia. Transformasi ini menyebabkan pergeseran dari pendekatan negara menjadi polisentrisme, dengan meningkatnya peran Hallyu sebagai aktor non-negara. Artikel penelitian ini memberikan analisis rinci tentang Hallyu, fase perkembangannya, dan integrasinya ke dalam diplomasi publik Korea Selatan. Hallyu, atau gelombang Korea, telah menjadi aktor non-negara yang signifikan dalam diplomasi publik Korea Selatan, yang berkontribusi terhadap efektivitas diplomasi publik negara tersebut dengan membangun pemahaman lintas budaya dan hubungan antara Korea dan masyarakat asing. Artikel penelitian ini juga membahas pelembagaan diplomasi publik Korea Selatan, yang memasuki periode evolusi keempat di akhir tahun 2000-an dengan "Global Korea Vision" dan intensifikasi kegiatan diplomasi publik dan nation branding. Periode ini melihat visi baru pemerintah tentang citra internasional Korea, yang mencakup intensifikasi kegiatan yang telah dipraktikkan selama periode yang dibahas sebelumnya.

Artikel penelitian tersebut diakhiri dengan membahas tantangan yang dihadapi oleh diplomasi publik Korea Selatan, termasuk kurangnya strategi yang komprehensif, koordinasi, dan tidak adanya bagian 'mendengarkan' dalam diplomasi publik. Secara keseluruhan, artikel penelitian ini memberikan tinjauan

yang rinci dan komprehensif mengenai evolusi diplomasi publik Korea Selatan, dengan menyoroti peran aktor non-negara dan tantangan yang dihadapi dalam transformasinya.

Artikel penelitian yang keempat yang ditulis oleh Raha Mirshahi (2021) membahas peran *Hallyu*, fenomena budaya Korea Selatan, dalam diplomasi publik dan nation branding negara tersebut. Penulis berpendapat bahwa *Hallyu* telah berperan penting dalam mengubah persepsi atas Korea Selatan di kancah global, memfasilitasi negara tersebut untuk mencapai berbagai tujuan sosial, politik, dan ekonomi. Tujuan-tujuan ini termasuk membangun kepercayaan dan hubungan, menghilangkan stereotip, meningkatkan brand politik internasional negara, menyoroti sejarah dan pencapaian negara, dan mendukung ekonomi. Artikel penelitian ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama mengonseptualisasikan kerangka kerja utama dari *nation branding*, diplomasi publik, dan berbagai bentuk kekuatan relasi di arena global. Bagian kedua mengkaji evolusi historis dari *nation branding* Korea Selatan, dengan fokus pada peran *Hallyu* dalam transformasi citra negara. Bagian ketiga membahas pentingnya ‘mendengarkan’ dalam diplomasi publik dan advokasi, dengan menekankan peran aktor negara dalam menyampaikan posisi mereka kepada publik asing. Bagian keempat memberikan kesimpulan dan menyoroti pentingnya memahami hubungan konseptual antara budaya suatu negara sebagai elemen dari brand negara tersebut dan peran budaya sebagai penopang diplomasi publik.

Artikel penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur akademis, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Sumber-sumbernya meliputi para ahli hubungan internasional, ahli marketing, kajian budaya, kajian media, pariwisata, dan berbagai bentuk diplomasi budaya yang terkait dengan *Hallyu*. Artikel penelitian ini juga menganalisis dokumen kebijakan pemerintah, publikasi hukum, lembaga-lembaga, organisasi internasional, wawancara media, dan konten budaya yang dipublikasikan. Secara keseluruhan, artikel penelitian ini memberikan tinjauan komprehensif mengenai peran *Hallyu* dalam diplomasi publik dan nation branding Korea Selatan yang menyoroti pentingnya memahami hubungan antara budaya suatu negara dan pengaruh globalnya.

Penelitian terdahulu yang terakhir, oleh Kadir Jun Ayhan (2022). Penelitian ini membahas upaya diplomasi publik Korea Selatan selama pandemi COVID-19 dan bagaimana upaya mempengaruhi status Korea Selatan dalam tata kelola global. Diplomasi publik Korea Selatan selama pandemi bertujuan untuk meningkatkan status globalnya dengan memproyeksikan keberhasilannya dan berbagi pengetahuannya. Negara tersebut meluncurkan beberapa kampanye diplomasi publik, termasuk kampanye TRUST dan kampanye #StayStrong, untuk berbagi pengalaman terbaiknya dalam mengelola pandemi dan mempromosikan kerja sama dan solidaritas internasional. Selain itu, Korea Selatan memberikan bantuan kemanusiaan yang signifikan, dengan menyalurkan bantuan senilai \$586 juta ke 125 negara pada tahun 2020, dengan fokus pada wilayah dan negara strategis.

Penelitian ini menganalisis distribusi bantuan Korea dan tujuannya, serta prospek diplomasi publik negara tersebut selama pandemi. Penelitian ini berargumen bahwa pandemi membantu upaya Korea Selatan untuk mendapatkan status sebagai pemimpin global, dengan menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas internasional.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Teori/ Konsep	Hasil Penelitian
Mi Sook Park	<i>South Korea Cultural History Between 1960s and 2012</i>	Diplomasi Budaya	Kebijakan budaya sangat dipengaruhi oleh pergolakan politik dalam berbagai periode sejarah Korea. Kebijakan budaya Korea sejak Republik ketiga hingga pemerintahan Lee Myoungbak dapat dipahami dalam konteks pembangunan yang dipimpin negara sebagai sarana kontrol sosial untuk mencapai kemakmuran ekonomi.
Seow Ting Lee dan Hun Shik Kim	<i>Nation branding in the COVID-19 era: South Korea's pandemic public diplomacy</i>	<i>Nation Branding, Diplomasi Publik, Soft Power</i>	Respons Korea Selatan terhadap pandemi COVID-19 telah meningkatkan citra global dan nation brand negara tersebut secara signifikan. Strategi komunikasi kesehatan masyarakat yang efektif,

			diplomasi masker, dan upaya berbagi sumber daya berkontribusi terhadap persepsi positif ini, sehingga menjadikan negara ini sebagai model untuk diikuti oleh negara-negara lain selama pandemi ini.
Muzaffar S. Abduazimov	<i>Public Diplomacy: Reappraising the South Korean Case through an Evolutionary Approach</i>	Diplomasi Publik	Pergeseran dari diplomasi publik G2P ke P2P dan integrasi <i>Hallyu</i> ke dalam diplomasi publik Korea Selatan
Raha Mirshahi	<i>Hallyu: How South Korean Cultural Diplomacy Shapes the Nation Brand</i>	Diplomasi Publik, <i>Nation Branding</i>	Korean Wave (<i>Hallyu</i>) berperan penting dalam mentransformasi nation brand Korea Selatan dan mengubah citra global negara tersebut dari negatif menjadi positif. Transformasi ini disebabkan oleh perencanaan strategis dan investasi negara, dukungan dan pengaruh perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan, serta mobilisasi kolektif dan tekad penduduk Korea Selatan.
Kadir Jun Ayhan	<i>South Korea's Public Diplomacy During the Covid-19 Pandemic: Seeking Status as an Authority in Global Governance</i>	Diplomasi Publik	Pandemi telah berperan sebagai katalis bagi Korea Selatan dalam mencapai tujuan diplomasi publiknya, yaitu meningkatkan status globalnya dengan menjadi salah satu otoritas teratas di berbagai bidang isu.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Diplomasi Publik

Diplomasi publik adalah kegiatan, yang diarahkan ke luar negeri dalam bidang informasi, pendidikan, dan budaya, yang tujuannya adalah untuk memengaruhi pemerintah negara lain dengan memengaruhi warga negaranya (Frederick, 1993). Diplomasi publik dalam perkembangannya terus mengalami perdebatan di kalangan para sarjana, sehingga tidak ada satu teori yang baku mengenai diplomasi publik. Hal ini dinyatakan oleh beberapa sarjana seperti,

“despite the growing significance of public diplomacy in contemporary international relations, scholars have not yet pursued or even sufficiently promoted systematic theoretical research in this field” (Gilboa, 2008).

Adapun Mirshahi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa,

“in a rapidly evolving global context, it is still difficult to share one single definition of public diplomacy, though many have tried” (Mirshahi, 2021).

Menurut Malone (1985), diplomasi publik merupakan komunikasi langsung dengan masyarakat luar negeri, dengan tujuan untuk memengaruhi pemikiran mereka dan pemerintah mereka. Pada definisi ini, Malone memberikan pengertian mengenai tujuan diplomasi publik. Sedangkan Tuch (1990), mendefinisikan diplomasi publik sebagai proses komunikasi pemerintah dengan publik asing dalam upaya untuk memberikan pemahaman mengenai gagasan dan cita-cita negaranya, institusi dan budayanya, serta tujuan dan kebijakan nasionalnya. Definisi Tuch tersebut mengidentifikasi aktor dan konten dalam diplomasi publik. Seiring dengan perkembangan hubungan internasional dan komunikasi, definisi diplomasi publik juga mengalami perkembangan, seperti penambahan aktor non-negara. Dalam hal ini,

Signitzer dan Coombs (1992) mendefinisikan diplomasi publik sebagai cara yang dilakukan baik oleh pemerintah dan individu atau kelompok swasta, untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung sikap dan opini publik, yang mana berdampak langsung pada keputusan kebijakan luar negeri pemerintah lain. Menurut Gilboa (2008), diplomasi publik adalah di mana aktor non-negara menggunakan media dan saluran komunikasi lainnya untuk mempengaruhi opini publik dalam masyarakat luar negeri. Gilboa (2008) menyebutkan adanya tiga revolusi di dunia yang telah menjadi tantangan dan kebutuhan diplomasi publik. Ketiga revolusi tersebut adalah revolusi teknologi komunikasi, revolusi politik, dan revolusi hubungan internasional (Gilboa, 2008). Adanya revolusi teknologi komunikasi seperti kemajuan media massa dan terciptanya internet telah meningkatkan keragaman cara penyampaian dan sistem aliran informasi (Gilboa, 2008). Kini, jaringan berita global dan internet telah dianggap sebagai pusat sumber informasi tentang permasalahan dunia (Gilboa, 2008). Revolusi politik telah mengubah banyak masyarakat dari pemerintahan otokratis menjadi demokrasi, sehingga membuat lebih banyak orang bisa ikut serta dalam proses politik (Gilboa, 2008). Sedangkan, revolusi dalam hubungan internasional telah mengubah tujuan dan cara negara menjalankan kebijakan luar negeri (Gilboa, 2008). Citra dan reputasi yang baik di seluruh dunia, yang dicapai melalui daya tarik dan persuasi, menjadi lebih penting daripada wilayah, akses, dan bahan mentah yang biasanya diperoleh melalui tindakan militer dan ekonomi (Gilboa, 2008).

Memasuki abad ke-21, beberapa sarjana memperbaharui konsep diplomasi publik menjadi “diplomasi publik baru”, di mana konsep ini disesuaikan dengan kondisi di era informasi sebagai dampak dari adanya revolusi dalam hubungan internasional dan komunikasi. Potter (2002), dalam tulisannya menekankan bahwa,

“the increased importance of public opinion, the rise of a more intrusive and global media, increased global transparency brought about by advances in communications and the related phenomenon of a more

activist civil society, and the rise of a global culture leading to a reflexive desire to protect cultural diversity” (Potter, 2002).

Menurut Potter (2002), di dunia yang terglobalisasi, opini publik menjadi lebih penting dari sebelumnya. Masyarakat semakin tidak percaya terhadap pemerintah dan menuntut transparansi dan masukan yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan (Potter, 2002). Dengan banyaknya aktor dan siklus berita yang tidak terbatas, kementerian luar negeri berada di bawah tekanan untuk memberikan substansi sesuai permintaan, untuk waspada dan responsif terhadap suasana hati publik dan untuk menyangkal informasi yang salah dan ketidakbenaran di ranah publik (Potter, 2002). Sebagaimana Potter, Melissen juga menyoroti munculnya aktor-aktor non-negara dalam konteks diplomasi publik (Melissen, 2005). Selain itu, Melissen juga berbicara mengenai posisi sentral diplomasi publik dalam kebijakan luar negeri, tentang sulitnya mencocokkan kebutuhan informasi dalam dan luar negeri, dan pola komunikasi dua arah dalam pertukaran informasi antar negara.

“The new public diplomacy will be an increasingly standard component of overall diplomatic practice and is more than a form of propaganda conducted by diplomats” (Melissen, 2005).

Dalam tulisannya, Melissen menggarisbawahi bahwa dalam negara yang memiliki interdependensi ekonomi dan politik yang besar, serta interkoneksi masyarakat yang tinggi, diplomasi publik menjadi aktivitas yang esensial. Melissen berargumen, bahwa meskipun diplomasi publik dilakukan oleh negara, diplomasi publik bukanlah suatu aktivitas yang hanya bersifat ‘kenegaraan’. Dalam hal ini, Melissen menyoroti peranan aktor-aktor non-negara termasuk supranasional dan subnasional dalam aktivitas diplomasi publik. Melissen juga berpendapat bahwa dalam dunia internasional yang kini saling terhubung, mencocokkan strategi komunikasi antara publik luar negeri dengan publik dalam negeri menjadi sebuah tantangan. Dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi, aliran informasi menjadi tidak terbatas sehingga apa yang disampaikan kepada publik dalam negeri juga dapat sampai kepada publik luar negeri, demikian sebaliknya. Menurut

Melissen (2005), diplomasi publik dapat mencapai berbagai tujuan kepentingan. Melalui diplomasi publik, negara dapat mencapai kepentingan dalam hal perdagangan dan investasi asing, dan dapat juga mencapai kepentingan yang berhubungan dengan pencegahan konflik dan intervensi militer. Hal ini dimungkinkan dengan sifat diplomasi publik di mana aliran informasi terjadi secara dua arah. Sistem aliran informasi dua arah dalam konteks diplomasi publik ini dijelaskan lebih lanjut oleh Gilboa (2008) dengan merujuk pada klasifikasi model hubungan masyarakat menurut Grunig (1993), yaitu: *two-way asymmetrical* dan *two-way symmetrical*. Pada model *two-way asymmetrical*, diplomasi publik ditujukan untuk mengubah opini, perilaku, dan kebijakan negara lain (Grunig, 1993). Sedangkan pada model *two-way symmetrical*, terdapat keinginan negara yang melakukan diplomasi publik untuk turut mengubah kebijakannya (Grunig, 1993). Dalam hal ini, diplomasi publik tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap negara lain, tetapi juga untuk memperbaiki kebijakan berdasarkan respons negara lain.

Meski terdapat banyak pendapat mengenai definisi dan interpretasi diplomasi publik, peneliti dapat menelaah fenomena atau kasus diplomasi publik melalui pengertian yang digunakan, diinterpretasikan, dan dipraktikkan oleh suatu negara. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mirshahi

“we can narrow it down when observing a particular country’s use of the term, their interpretations, or their own practices of engaging with foreign publics” (Mirshahi, 2021).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian diplomasi publik yang digunakan oleh pemerintah Korea Selatan. Menurut kementerian luar negeri Republik Korea, diplomasi publik adalah “kegiatan diplomatik yang dengannya Korea mempromosikan pemahaman warga negara asing dan meningkatkan kepercayaan terhadap Korea secara langsung atau bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Ini adalah pendekatan multifaset yang memanfaatkan kebijakan, pengetahuan, dan budaya, dll.” (*Introduction of the Public Diplomacy & Policies*, n.d.) Dalam hal ini,

pengertian yang paling dekat dengan definisi diplomasi publik yang digunakan pemerintah Korea Selatan adalah definisi yang dikemukakan oleh Frederick (1993), yaitu “kegiatan, yang diarahkan ke luar negeri dalam bidang informasi, pendidikan, dan budaya, yang tujuannya adalah untuk memengaruhi pemerintah asing dengan memengaruhi warga negaranya.” Menurut Frederick, kegiatan diplomasi publik “mencakup siaran radio luar negeri [...], pertukaran pelajar dan fakultas, penempatan pembicara [...] terkemuka di luar negeri, program dan pertukaran budaya, dan distribusi terbitan berkala yang didanai pemerintah” (Frederick, 1993).

Nicholas J. Cull (2019) dalam tulisannya menyebutkan adanya lima cara berbeda yang digunakan aktor internasional dalam melakukan diplomasi terhadap publik asing, yaitu: *Listening*, *Advocacy*, *Cultural Diplomacy*, *Exchange Diplomacy*, dan *International Broadcasting*.

1. *Listening*

‘Mendengarkan’ melibatkan proses pengumpulan informasi dan pemahaman perspektif, opini, dan kebutuhan publik asing yang menjadi sasaran. Komponen ini merupakan dasar bagi semua diplomasi publik yang efektif, karena komponen ini memungkinkan para diplomat untuk menyesuaikan pesan dan strategi mereka agar sesuai dengan audiens yang mereka tuju. ‘Mendengarkan’ dapat difasilitasi melalui berbagai cara, termasuk survei, *FGD*, dan komunikasi langsung dengan pemangku kepentingan utama (Cull, 2019).

2. *Advocacy*

Advokasi melibatkan promosi kepentingan, kebijakan, atau nilai aktor internasional kepada publik asing. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti kampanye media, pidato publik, dan penjangkauan diplomatik. Tujuannya adalah untuk memengaruhi opini publik dan membentuk persepsi dengan cara yang menguntungkan (Cull, 2019).

3. *Cultural Diplomacy*

Diplomasi budaya berfokus pada pertukaran praktik, tradisi, dan nilai budaya antarnegara. Ini dapat mencakup acara budaya, pertukaran pendidikan, dan promosi produk budaya seperti film, musik, dan sastra. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan saling pengertian dan apresiasi antarbudaya (Cull, 2019).

4. *Exchange Diplomacy*

Diplomasi pertukaran melibatkan pertukaran orang, ide, dan pengetahuan antarnegara. Ini dapat mencakup pertukaran pendidikan, program pelatihan profesional, dan inisiatif diplomasi antarmasyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan dan menumbuhkan kerja sama melalui pengalaman bersama dan pembelajaran bersama (Cull, 2019).

5. *International Broadcasting*

Penyiaran internasional mengacu pada penggunaan radio, televisi, dan media digital untuk berkomunikasi langsung dengan publik asing. Ini dapat mencakup penyiaran berita, program pendidikan, dan konten budaya. Tujuannya adalah untuk menjangkau khalayak yang luas dan menyampaikan pesan aktor internasional secara konsisten dan terkendali (Cull, 2019).

Menurut Cull, kelima cara tersebut harus digunakan bersama-sama dengan komponen lainnya untuk mencapai diplomasi publik yang efektif (Cull, 2019). Adapun kelima cara tersebut dapat dilakukan melalui berbagai instrumen. Beberapa kategori instrumen diplomasi publik menurut Gonesh dan Melissen (2005) adalah sebagai berikut:

1. Media Cetak dan Penyiaran

Radio, televisi, dan media cetak merupakan instrumen diplomasi publik yang paling efektif karena mereka mampu mencapai audiens luas dengan cepat. Meskipun memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan, ketika pesan yang disampaikan salah dimengerti, konsekuensinya dapat sangat merugikan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai media

dan jaringan di dalamnya menjadi sangat penting (Gonesh & Melissen, 2005).

2. Internet

Situs web kedutaan besar atau kementerian luar negeri merupakan representasi dari identitas negaranya. Oleh karena itu, situs web yang dirancang secara menarik, tersusun jelas, dan informatif, dapat memberikan pengenalan yang baik kepada masyarakat luas (Gonesh & Melissen, 2005).

3. Publikasi

Publikasi seperti brosur, panduan, dan majalah termasuk ke dalam kategori instrumen diplomasi publik. Meskipun demikian, pengaruhnya menjadi kurang signifikan seiring perkembangan zaman. Banyak negara kini lebih banyak berinvestasi pada pengembangan media digital dan elektronik. Namun, di beberapa negara yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi, publikasi cetak tetap menjadi alat yang berharga (Gonesh & Melissen, 2005).

4. Film, Video, CD-ROM, dan DVD

Media penayangan seperti film, video, dan DVD merupakan alat diplomasi publik yang cukup berpengaruh. Media ini dapat diputar dalam berbagai konteks, dan bentuknya yang berupa audio-visual dapat secara efektif mengkomunikasikan pesan yang kompleks. Film dapat menyoroti berbagai aspek kehidupan di suatu negara secara mendalam dan dapat dianggap sebagai sumber informasi yang reliabel oleh penontonnya (Gonesh & Melissen, 2005).

5. Proyek dan Acara

Proyek dan acara yang dimaksud dapat berupa pidato, debat, pesta, konferensi, pertunjukan, proyek khusus, seminar, dan kampanye jangka panjang. Melalui proyek dan acara, diplomat dapat merepresentasikan identitas dan menyertakan nilai-nilai negaranya (Gonesh & Melissen, 2005).

6. Kedutaan Besar dan stafnya

Gedung kedutaan besar juga dinilai dapat menjadi representasi atas identitas negaranya. Melalui kebersihan ruangan, fasilitas lengkap, informasi yang menarik, serta pelayanan yang ramah dapat membuat pengunjung terkesan (Gonesh & Melissen, 2005).

Namun, dalam penelitian ini, penulis mengecualikan penggunaan instrumen media cetak dan penyiaran, publikasi, CD-ROM dan DVD. Hal ini dikarenakan keterbatasan jarak, lokasi, dan akses terhadap instrumen-instrumen tersebut akibat penelitian ini dilakukan dari luar negara Korea Selatan, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengumpulan data dari sumber tersebut. Dalam penelitian ini, penulis juga melengkapi kategori instrumen diplomasi publik dengan instrumen diplomasi publik menurut Mamchii (2023). Hal ini dikarenakan adanya perkembangan zaman yang turut memengaruhi ragam instrumen dalam diplomasi publik. Menurut mamchii, alat utama diplomasi publik adalah; pertukaran budaya, publikasi, radio dan televisi, film, internet, dan media sosial (Mamchii, 2023). Pada klasifikasi instrumen menurut Mamchii, penulis juga mengecualikan penggunaan instrumen radio dan televisi. Hal ini serupa dengan penggunaan instrumen menurut Gonesh dan Melissen, di mana pengecualian dalam penelitian ini terjadi karena adanya keterbatasan akses terhadap instrumen-instrumen tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi diplomasi publik dari para sarjana, terdapat tiga elemen dalam mengidentifikasi konsep diplomasi publik, yaitu: aktor yang melaksanakan, tujuan dilakukannya, dan instrumen yang digunakan. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa sarjana mengindikasikan bahwa aktor diplomasi publik terdiri atas negara dan non-negara (organisasi internasional non-pemerintah, kelompok swasta, dan individu), dengan tujuan untuk mempengaruhi publik asing dan memberikan pemahaman atas gagasan dan nilai-nilai yang dianutnya, melalui berbagai instrumen seperti media, pendidikan, kebudayaan, pertukaran, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep diplomasi publik sebagai landasan, yang berfokus pada aktivitas Korea Selatan sebagai

aktor negara untuk memberikan pemahaman atas cita-cita negaranya dan memengaruhi opini publik asing atas citra negaranya.

2.2.2 Pandemi COVID-19

Virus Corona atau Coronavirus Disease (COVID-19) merupakan keluarga virus besar yang biasanya menysasar organ pernapasan. Nama ini berasal dari kata Latin “corona” yang berarti mahkota, karena bentuk mikroskopis virus ini menyerupai pinggiran runcing yang mengelilingi virus ini (Osler, 2020). Menjelang berakhirnya tahun 2019, muncul laporan mengenai wabah pneumonia yang penyebabnya tidak dapat dijelaskan, dengan kasus-kasus berkumpul di sekitar Pasar Grosir Makanan Laut Huanan, Tiongkok, yang menjual ikan hidup, unggas, dan burung (Osler, 2020). Kasus-kasus tersebut diamati pada tanggal 8 Desember dan cluster pertama kali diidentifikasi pada tanggal 31 Desember. Seluruh kasus suspek yang ditemukan diperiksa dengan metode penemuan kasus aktif dan pemeriksaan retrospektif. Sekitar 300 kasus di Wuhan diyakini telah terinfeksi virus baru ini, dan empat orang meninggal (Osler, 2020).

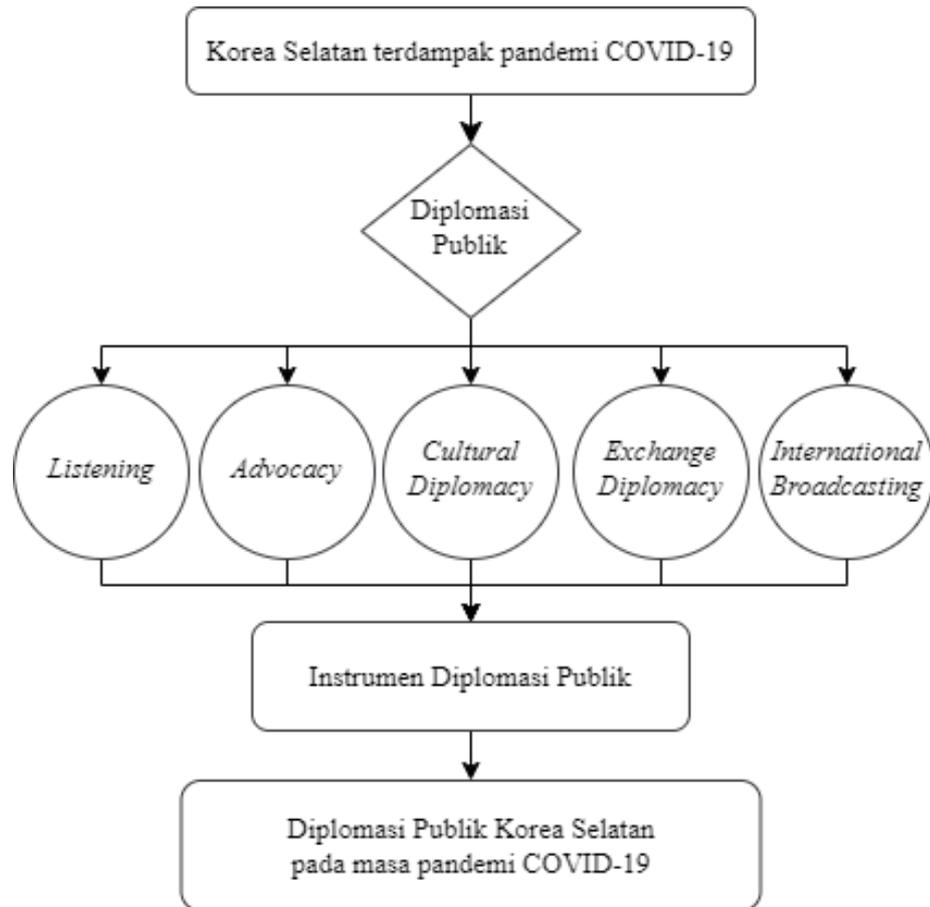
Virus COVID-19 ini mirip dengan SARS dan sangat menular (Osler, 2020). Virus pernapasan tersebut dapat berpindah melalui udara, terbungkus dalam tetesan kecil yang terbentuk ketika orang yang terjangkit bernapas, berbicara, batuk, atau bersin (Osler, 2020). Ketika orang yang sakit batuk atau bersin, mereka mengeluarkan kabut, dan ketika tetesan tersebut menyentuh hidung, mata, atau mulut orang lain, mereka akan menularkan virus (Osler, 2020). Dalam beberapa kasus, seseorang dapat tertular dengan menyentuh tetesan air pada permukaan—dan kemudian menyentuh selaput mukosa di mulut, mata, dan hidung (Osler, 2020). Hal ini menjadikan aktivitas mencuci tangan sebagai tindakan penting bagi kesehatan masyarakat.

Wabah penyakit serupa sebelumnya, termasuk SARS, juga diduga berasal dari pasar hewan hidup. Unta menularkan virus corona penyebab

MERS ke manusia. Meski demikian, hewan yang menjadi sumber COVID-19 masih belum diketahui (Osler, 2020). Adapun tanda-tandanya, pada 10 dan lebih dari 30 persen kasus, dua dari tujuh virus corona yang menginfeksi manusia, seperti SARS dan MERS, dapat menyebabkan pneumonia parah, bahkan kematian. Kebanyakan pasien sekarang mulai mengalami demam, batuk, dan sesak napas, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Osler, 2020). Sebagian dari 41 pasien pertama di Wuhan yang terkonfirmasi positif COVID-19 menunjukkan hasil pemeriksaan pneumonia dan kelainan paru-paru (Osler, 2020). Dari 17.000 orang di Tiongkok yang terinfeksi, 82% mengalami infeksi sedang, 15% mengalami gejala parah, dan 3% berada dalam kondisi kritis (Osler, 2020). Kurang dari 2 persen telah meninggal karena infeksi yang dikonfirmasi. Banyak dari mereka yang meninggal adalah pria lanjut usia di atas 65 tahun yang memiliki masalah kesehatan mendasar atau menderita penyakit kronis lainnya (Osler, 2020).

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan berupaya untuk menganalisis secara deskriptif diplomasi publik Korea Selatan dalam konteks pandemi COVID-19. Penulis menganalisis diplomasi publik Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19 menggunakan lima kerangka diplomasi publik yang dikemukakan oleh Nicholas J. Cull.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, akan dideskripsikan diplomasi publik yang dijalankan Korea Selatan pada masa dan/atau setelah terdampak pandemi COVID-19. Untuk mendeskripsikan hal tersebut, penulis akan menggunakan konsep diplomasi publik. Penulis kemudian akan memberikan analisis deskriptif terhadap aktivitas diplomasi publik yang dijalankan oleh Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan lima cara diplomasi publik menurut Nicholas J. Cull. Penulis juga akan mendeskripsikan beberapa instrumen yang digunakan pemerintah Korea Selatan dalam menjalankan diplomasi publik selama pandemi COVID-19. Melalui hasil analisis deskriptif yang dilakukan menggunakan teori Cull, penulis dapat memberikan penjelasan komprehensif mengenai bagaimana diplomasi publik Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yang mana penelitian ini berupaya untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai diplomasi publik yang diterapkan pemerintah Korea Selatan serta menginterpretasikan aktivitas diplomasi publik Korea Selatan dalam konteks pandemi COVID-19.

Menurut John W. Creswell (2007), penelitian kualitatif melibatkan proses penyelidikan yang bertujuan memahami masalah sosial atau kemanusiaan dengan cara membangun gambaran yang menyeluruh dan kompleks. Pendekatan ini bersifat induktif, interpretatif, dan naturalistik, dengan mempelajari orang, kasus, fenomena, situasi sosial, dan proses dalam konteks alaminya. Prosesnya mencakup pengumpulan data melalui berbagai metode seperti wawancara, forum diskusi kelompok, dan observasi, yang kemudian dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi tema umum dari temuan yang spesifik. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang umumnya lebih menekankan olah kata sebagai strategi pendekatan penelitian dan analisis data, sehingga cenderung bersifat induktif, konstruktif, dan interpretatif (Bryman, 2012). Penelitian kualitatif mempelajari hal-hal yang terjadi secara alami, berupaya untuk memaknai atau menafsirkan suatu fenomena dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Penelitian kualitatif meliputi fakta-fakta empiris – seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, observasi, sejarah, interaksi, dan teks visual – yang mendeskripsikan rutinitas, krisis, dan makna kehidupan (Denzin & Lincoln, 2005).

3.2 Fokus Penelitian

Menetapkan fokus penelitian adalah tahap krusial dalam metodologi penelitian kualitatif. Fokus penelitian ditujukan untuk memusatkan penelitian agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami batasan-batasan penelitian. Hal ini membantu penulis agar pembahasan tetap spesifik dan terfokus, sekaligus mempermudah pembaca memahami objektif dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan penulis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John W. Creswell, proses penelitian yang baik melibatkan klarifikasi tujuan penelitian, pemilihan fokus penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian, pengidentifikasian lingkup penelitian, pemahaman konteks penelitian, serta refleksi yang berulang dalam perjalanan penelitian (Creswell, 2007).

Fokus pada penelitian ini adalah diplomasi publik yang dijalankan oleh pemerintah Korea Selatan dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19. Mengingat penyebaran COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga penelitian ini selesai dibuat, penulis menetapkan batasan waktu penelitian pada rentang waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2023, di mana pada periode ini masih dianggap sebagai masa pandemi COVID-19.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sebagian data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks narasi yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah Korea Selatan yang diakses melalui kanal resmi pemerintah Korea Selatan seperti situs web Kementerian Luar Negeri Republik Korea (<https://mofa.go.kr/>) dan lembaga pemerintahan. Penulis juga memperoleh data melalui penelusuran literatur, jurnal, dan media massa daring yang terkait dengan kata kunci diplomasi publik Korea Selatan, kebijakan luar negeri Korea Selatan, diplomasi publik, dan pandemi COVID-19.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2014), terdapat beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif, seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen dan bahan visual. Pada penelitian berikut, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik studi dokumen dan bahan visual. Teknik ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data dari sumber resmi berupa dokumen-dokumen publik seperti laporan resmi kementerian, pidato resmi kenegaraan, catatan rekaman resmi, dan lain-lain. Penulis juga dapat mengumpulkan data dari hasil penelusuran pada media berita dan artikel jurnal.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah penulis melakukan penelusuran narasi secara daring dengan kata kunci: diplomasi publik, diplomasi publik Korea Selatan, pandemi COVID-19, dan pandemi COVID-19 di Korea Selatan. Kemudian penulis mengumpulkan data dari sumber resmi seperti situs pemerintahan Korea Selatan dan media massa yang kredibel. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti periode atau pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah/pemangku kepentingan untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam proses menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan *Grounded Theory* menurut Glaser dan Strauss yang disadur oleh Alan Bryman (2012). Melalui pendekatan ini, penulis melakukan *theoretical sampling* dan *constant comparison* untuk mengembangkan konsep, kategori, dan teori. *Theoretical Sampling* merupakan proses pengumpulan data untuk menghasilkan teori melalui aktivitas mengumpulkan, mengkode, dan menganalisis data, kemudian memutuskan data apa yang akan dikumpulkan selanjutnya dan di mana menemukannya. *Constant Comparison* mengacu pada proses menjaga hubungan dekat antara data dan konsep, sehingga keterhubungan antara konsep dan kategori dengan indikatornya tidak hilang. Proses ini mengharuskan peneliti untuk secara

berulang membandingkan fenomena yang telah dikodekan dengan kategori tertentu, sehingga elaborasi teoretis dari kategori itu dapat muncul.

Selanjutnya, penulis menerapkan teknik analisis data naratif yang dijelaskan oleh W. Lawrence Neuman (2014) dengan sistem periodisasi. Periodisasi memungkinkan penulis untuk menganalisis data berdasarkan pembagian aliran waktu, dengan demikian dapat diidentifikasi apa yang signifikan dan apa yang umum dalam periode atau di antara periode yang berbeda.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Diplomasi publik merupakan instrumen politik yang sudah sejak lama diterapkan Korea Selatan. Diplomasi publik Korea Selatan mengalami perubahan dari masa ke masa. Melalui hasil penelitian deskriptif ini, penulis menemukan bahwa diplomasi publik Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai aktor negara – yang dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri (MOFA) – berkolaborasi dengan berbagai aktor non-negara seperti organisasi internasional, lembaga *think tank*, perusahaan-perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat. Diplomasi publik Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19 bertujuan untuk memperkenalkan posisinya di tingkat internasional sebagai negara yang mampu memimpin transformasi global dan kerja sama internasional. Adapun diplomasi publik Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19 dilakukan melalui berbagai instrumen seperti pertukaran, pendidikan, kebudayaan, dan terutama media/saluran komunikasi digital.

Penelitian ini mengangkat topik mengenai diplomasi publik Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19 secara umum. Oleh karena itu, diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menganalisis topik serupa secara lebih spesifik. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan untuk mengkaji masalah dari perspektif dan teori yang berbeda seperti kebijakan luar negeri dan diplomasi budaya. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan indikator-indikator dari teori yang relevan untuk menguji efektivitas diplomasi publik Korea Selatan pada masa pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- 2015 MERS outbreak in Republic of Korea*. (n.d.). Retrieved August 12, 2024, from <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/2015-mers-outbreak>
- Abduazimov, M. S. (2017). Public Diplomacy: Reappraising the South Korean Case through an Evolutionary Approach. *Korea Journal*, 57(3), 83–111. <https://doi.org/10.25024/KJ.2017.57.3.83>
- Ayhan, K. J. (2022). South Korea's Public Diplomacy during the COVID-19 Pandemic: Seeking Status as an Authority in Global Governance. *Korea Economic Institute of America*. <https://keia.org/publication/south-koreas-public-diplomacy-during-the-covid-19-pandemic-seeking-status-as-an-authority-in-global-governance/>
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed). Oxford University Press.
- Call for Participation: Stay Strong Campaign 상세/보기* | Notice Embassy of the Republic of Korea
 to the Independent State of Papua New Guinea. (n.d.). Retrieved May 25, 2024, from https://overseas.mofa.go.kr/pg-en/brd/m_21234/view.do?seq=760248
- Choi, K. (with Center on Public Diplomacy). (2019). *The Republic of Korea's public diplomacy strategy: History and current status*. Figueroa Press.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (2nd ed). Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.

- Cull, N. J. (2019). *Public Diplomacy: Foundations for Global Engagement in the Digital Age*. Polity.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2005). Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. In *The Sage Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Ferrier, K. (2020, September 23). *South Korea President Stresses Peace, Inclusiveness, and Multilateralism at UN*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2020/09/south-korea-president-stresses-peace-inclusiveness-and-multilateralism-at-un/>
- Ferrier, K., & Hwang, S. (2020, April). *How South Korea Is Building Influence Through COVID-19 Testing Kits*. <https://thediplomat.com/2020/04/how-south-korea-is-building-influence-through-covid-19-testing-kits/>
- Frederick, H. H. (1993). *Global communication & international relations*. Wadsworth Pub. Co.
- Gilboa, E. (2008). Searching for a Theory of Public Diplomacy. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 55–77. <https://doi.org/10.1177/0002716207312142>
- Gonesh, A., & Melissen, J. (2005). *Public diplomacy: Improving practice*. Netherlands Inst. of Internat. Relations Clingendael.
- Grunig, J. E. (1993). Public Relations and International Affairs: Effects, Ethics and Responsibility. *Journal of International Affairs*, 47(1), 137–162.
- Gunjoo Jang & Won K. Paik. (2012). Korean Wave as Tool for Korea's New Cultural Diplomacy. *Advances in Applied Sociology*, 02(03), 196–202. <https://doi.org/10.4236/aasoci.2012.23026>
- Gurung, K. (2021). The outbreak of COVID-19 and its impact in South Korea's Tourism: A hope in Domestic Tourism. *Journal of Applied Sciences in Travel and Hospitality*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.31940/jasth.v4i1.2332>

- Introduction of the Public Diplomacy & Policies.* (n.d.). Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea. Retrieved July 29, 2024, from https://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_26885/contents.do
- Kim, H. (2020). The sociopolitical context of the COVID-19 response in South Korea. *BMJ Global Health*, 5(5), e002714. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002714>
- Kim, J. (2020, May 10). [전문] 문 대통령 “세계표준 된 K 방역, 국민의 위대함..
일본, 질병관리청 승격.” 경향신문.
<https://www.khan.co.kr/politics/president/article/202005101127001>
- Kim, M. (2020, April 28). *How South Korea stopped Covid-19 early.* The Strategist. <https://www.aspistrategist.org.au/how-south-korea-stopped-covid-19-early/>
- Korea Heritage Service.* (n.d.). Retrieved July 28, 2024, from <https://english.khs.go.kr/cha/idx/SubIndex.do?mn=EN>
- Korean New Deal: National Strategy for a Great Transformation.* (2020). Government of The Republic of Korea. https://english.moef.go.kr/co/fixFileDown.do?orgNm=Korean_New_Deal.pdf
- KOREAZ.* (n.d.). Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea. Retrieved April 16, 2024, from https://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_25757/contents.do
- Lee, J. (2020, December 9). *Online int’l conference discusses responses to COVID-19.* KOREA.Net. <https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=192592>
- Lee, S. T., & Kim, H. S. (2021). Nation branding in the COVID-19 era: South Korea’s pandemic public diplomacy. *Place Branding and Public Diplomacy*, 17(4), 382–396. <https://doi.org/10.1057/s41254-020-00189-w>
- Leonard, M. (2002). Diplomacy by Other Means. *Foreign Policy*, 132, 48. <https://doi.org/10.2307/3183455>

- Leonard, M., Stead, C., & Smewing, C. (with Foreign Policy Centre). (2002). *Public diplomacy*. Foreign Policy Centre.
- Malone, G. D. (1985). Managing Public Diplomacy. *The Washington Quarterly*, 8(3), 199–213. <https://doi.org/10.1080/01636608509450301>
- Mamchii, O. (2023, March 30). *The Concept of Public Diplomacy In the 21st Century*. <https://bestdiplomats.org/public-diplomacy/>
- Melissen, J. (Ed.) (with Ham, P. van, Hemery, J., Henrikson, A. K., Hocking, B., d’Hooghe, I., Michalski, A., CBE, W. O., Riordan, S., & Schneider, C. P.). (2005). *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Palgrave Macmillan UK.
- Mi Sook Park. (2016). South Korea Cultural History Between 1960s and 2012. *International Journal of Korean Humanities and Social Sciences*, 1, 71–118. <https://doi.org/10.14746/kr.2015.01.05>
- Mirshahi, R. (2021). *Hallyu: How South Korean Cultural Diplomacy Shapes the Nation Brand*. University of Ottawa.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed., Vol. 30). Pearson Education, Ltd. <http://www.jstor.org/stable/3211488?origin=crossref>
- Oh, S.-Y. (2020, May 14). *South Korea’s Success Against COVID-19*. <https://www.theregreview.org/2020/05/14/oh-south-korea-success-against-covid-19/>
- Osler, S. (2020). *Coronavirus Outbreak_ All the Secrets Revealed About the Covid-19 Pandemic. A Complete Rational Guide of its Evolution, Expansion, Symptoms and First Defense*. A. B. Lawal. libgen.li/file.php?md5=169fdf1c66aa9f69407be383d21cb37a
- Post COVID-19 Public Diplomacy Policy*. (2020, June 15). Public Diplomacy News | Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea. https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_22723/view.do?seq=319618&page=3

- Potter, E. (2002). Canada and the New Public Diplomacy. *International Journal*, 58(1), 43. <https://doi.org/10.2307/40203812>
- Signitzer, B. H., & Coombs, T. (1992). Public relations and public diplomacy: Conceptual covergences. *Public Relations Review*, 18(2), 137–147. [https://doi.org/10.1016/0363-8111\(92\)90005-J](https://doi.org/10.1016/0363-8111(92)90005-J)
- Stangarone, T. (2021, February 4). *The Impact of COVID-19 on South Korean Trade in 2020*. <https://thediplomat.com/2021/02/the-impact-of-covid-19-on-south-korean-trade-in-2020/>
- Statista. (2020, June 8). *Infographic: South Korean COVID-19 Test Kits Supply the World*. Statista Daily Data. <https://www.statista.com/chart/21931/covid-19-exports-test-kits-south-korea>
- Thompson, D. (2020, May 6). What's Behind South Korea's COVID-19 Exceptionalism? *The Atlantic*. <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/05/whats-south-koreas-secret/611215/>
- Tuch, H. N. (1990). *Communicating with the world: U.S. public diplomacy overseas*. St. Martin's Press.
- World Bank Group. (2023, September 27). *Korea-WBG Partnership on Pandemic Preparedness and Response* [Text/HTML]. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/korea/brief/korea-wbg-partnership-on-pandemic-preparedness-and-response>
- World Health Organization. (2023, March 28). *Coronavirus disease (COVID-19). Questions and Answers*. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19>
- Yim, H. (2002). Cultural identity and cultural policy in South Korea. *International Journal of Cultural Policy*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.1080/10286630290032422>